

BAB IV

ANALISA

A. Munculnya Kelas dan Ideologi Borjuis

Gagasan Marx tentang kelas tidak mudah untuk ditangkap. Seperti buah-buah dari gelombang besar, gagasan-gagasan itu timbul tenggelam dalam beberapa karyanya tanpa ada upaya sistematisasi. Dua dari beberapa karya Marx yang membicarakan kelas adalah Manifesto Komunis dan Brumaire XVIII.

Memahami gagasan Marx tentang kelas tidak bisa lepas dari konsepsi materialis atas sejarahnya. Manusia mulai menundukkan alamnya ketika mereka memproduksi kebutuhan hidupnya.¹ Ketika manusia mulai memproduksi kebutuhan hidupnya, kutukan pembagian kerja pun turun. Manusia mulai memilah kekuatan-kekuatan produktif yang penting dalam konteks lingkungan alam dan sosialnya. Kemajuan teknologi produksi di masa awal sejarah produksi, memunculkan kelebihan hasil kerja yang memungkinkan masyarakat menyimpan hasil kerjanya. Pada awalnya, kelebihan hasil kerja kolektif (surplus) yang masih tidak terlalu banyak ini bisa untuk memberi makan tukang-tukang yang membuat dan mengembangkan perkakas kerja. Ketika perkembangan kekuatan produksi meningkat, kelebihan hasil kerja juga meningkat. Hal ini memungkinkan untuk memberikan makan pada para tawanan perang yang di masa sebelumnya harus

¹ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 89

dibunuh. Munculnya budak tidak akan mungkin tanpa adanya kelebihan hasil kerja dalam masyarakat. Sejak itulah ketimpangan penguasaan atas kekuatan-kekuatan produksi muncul. Spesialis-spesialis mulai muncul dalam pembagian kerja. Spesialis pertama tentunya adalah tukang pembuat alat kerja dan senjata. Lalu tentara untuk melindungi kelebihan hasil kerja, perluasan lahan produktif, dan memperbanyak tenaga-tenaga kerja. Kelebihan hasil kerja masyarakat ini diambil secara langsung oleh golongan yang kemudian menjadi kelas penguasa melalui upeti dan/atau perampasan. Bandit-bandit perampas yang menguasai senjata akhirnya mampu membiayai produsen pemikiran seperti agamawan, penyair, atau filsuf guna menopang kekuasaannya lewat pemikiran. Pada masa inilah modal produksi perbudakan muncul dan menjadi modal yang dominan dalam peradaban Yunani-Romawi. Plato tidak perlu kerja di lahan pertanian atau menggembala ternak. Aristoteles hanya harus mendidik Aleksander Agung tanpa perlu melaut mencari ikan untuk makan.

Surutnya perbudakan di masa feodal tidak menyapakan hubungan penindasan antarmanusia. Petani-petani pengolah lahan sedikit lebih tinggi derajatnya dengan budak. Budak bisa dijual-belikan, sedangkan petani tidak. Tapi mereka menjadi seperti budak ketika mereka dikuasai oleh bangsawan-bangsawan feodal atau gereja sebagai hamba. Keterikatan petani yang menjurus pada 'semi-perbudakan' ini pada tuan-tuan tanah mereka diikat oleh gagasan tentang kewajiban, harga diri, dan takdir yang dikembangkan agama. Selain itu, munculnya kelas pemegang senjata yang terpisah dari produsen, memungkinkan

kelas penguasa untuk menguatkan ketundukan dan ketergantungan kolektif produsen.

Meski di masa feodal ‘produksi-untuk-dipakai’ masih mendominasi ekonomi masyarakat dan setiap ‘manor-manor’ relatif memenuhi kebutuhannya sendiri, ‘produksi-untuk-dijual’ juga ada untuk memenuhi kepentingan kelas penguasa terhadap barang mewah, tentara, senjata, puisi, dan pesta-pora.

Dari uraian Manifesto bab pertama bisa disimpulkan bahwa kelas muncul berkaitan dengan adanya pembagian kerja antaranggota masyarakat berkaitan dengan penguasaan kekuatan produksi:² lahan, perkakas kerja, dan tenaga kerja. Tentara-tentara yang menaklukkan daerah-daerah disekitarnya dan menguasai penduduknya sebagai tawanan perang yang kemudian dipekerjakan sebagai budak, menjadi kelas penguasa kekuatan produksi. Hubungan-hubungan produksi pun diatur. Budak-budak menjadi kelas yang dikuasai. Begitu pula dengan bangsawan-bangsawan dan pemimpin gereja feodal yang menampung petani dan budak di bawah ‘perlindungan’ prajurit-prajuritnya, menjadi kelas yang menguasai kekuatan produktif. Petani menjadi kelas yang dikuasai.

Munculnya kota-kota mandiri yang berdiri di atas ekonomi pertukangan atau industri yang dikembangkan oleh orang-orang yang terbuang dari tatanan feodal, yaitu borjuis, serta perkembangan yang terjadi dalam teknik-teknik industri karena akumulasi uang melalui perdagangan, tatanan feodal perlahan runtuh. Pertumbuhan penduduk dan migrasi ke pusat ekonomi baru ini

² *Ibid.*, hlm. 111

mempercepat keruntuhannya. Petani-petani yang kehilangan lahan-lahan pertaniannya menjadi orang yang tidak memiliki apapun selain tenaga kerjanya untuk bertahan hidup. Orang-orang miskin yang bebas ini memungkinkan munculnya pasar tenaga kerja. Mulailah tenaga kerja menjadi komoditi yang dijual-belikan.³ Untuk bisa berlangsungnya keadaan ini kelas borjuis yang sedang bertumbuh perlu gagasan-gagasan tentang ‘kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan’ yang menggantikan konsep ‘kewajiban, harga diri, dan takdir Ilahi’. Filsafat Pencerahan dan Reformasi Protestan merupakan buah dari perjuangan borjuis melenyapkan pola hubungan ‘bangsawan-hamba’ dan memompa keluarnya tenaga-tenaga kerja bebas (proletar) yang tidak terikat pada tanah dan tuan feodal dari manor-manor dan gilda-gilda yang bangkrut. Proletar lahir sebagai anak haram kapitalisme. Individualisme, liberalisme, demokrasi, dan negara modern lahir sebagai lembaga-lembaga baru yang menopang perjuangan borjuis menghancurkan tatanan kelas feodal. Perjuangan ini memuncak dalam Revolusi Perancis yang didahului oleh Revolusi Parlemen di Inggris yang mengikis habis kekuasaan kelas bangsawan seabad sebelumnya.

Dalam Brumaire XVII, Marx menggambarkan perjuangan borjuis menumbangkan feodalisme. Revolusi Perancis 1789 memenggal Bourbon, dinasti feodal yang runtuh diterpa badai perubahan modal produksi yang dihembuskan borjuis-borjuis Perancis. Inilah revolusi sosial yang kekuatannya membongkar

³ Mansour Fakhri, *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta, Insist, 2002), hlm.

tatanan ekonomi lama hingga ke akar-akarnya. Kudeta Louis Bonaparte, pemimpin lumpen-proletar yang tergabung dalam Perhimpunan 10 Desember, adalah sebuah revolusi politik yang hanya berkenaan dengan perebutan kekuatan antar kepentingan borjuis. Dengan memanfaatkan ‘massa mengambang’ penduduk pedesaan Perancis yang terdiri dari petani-petani kecil, Louis Bonaparte mereorganisasi kekuasaan, menata ulang pemerintahan dan birokrasi, tentara, dan skema pajak, demi kepentingan kelas borjuis pada umumnya. Ideologi Napoleon dikembangkan sebagai pembenar semua pembenahan yang dilakukan borjuis melalui Louis Bonaparte. Proletar bertekuk lutut dan menjadi kelas tertindas dalam tatanan ekonomi kapitalis.⁴

Proletar, mau tidak mau, harus menjual tenaga kerjanya untuk bertahan hidup. Meski Marx mengakui banyaknya kelas-kelas dalam tatanan kapitalis, tapi Marx melihat adanya dua kelas yang harus berhadapan muka, borjuis/kapitalis dan proletar. Tugas terakhir borjuis yang sukses adalah membuat insinyur, dosen, filsuf, penyair, seniman untuk menjadi buruh upahan dalam tatanan ekonomi kapitalis. Seperti proletar, kelas ini harus menjual kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kita tahu bahwa kelas ini lebih dekat dengan kepentingan borjuis. Tidak jarang kelas ini menjadi aparat ideologi negara borjuis menciptakan berbagai teori dan konsep yang membenarkan tatanan kapitalis.

⁴ Karl Marx, *Brumaire XVIII Louis Bonaparte*, terj. Oey Hay Djoen (Yogyakarta, Hastamitra, 2007), hlm. 1-3

Hikmah yang bisa diambil dari Manifesto dan Brumaire XVII adalah bahwa negara merupakan alat kekuasaan kelas berkuasa.⁵ Revolusi-revolusi yang bertujuan untuk mengganti kekuasaan politik negara hanyalah sebatas hasil persaingan antaranggota kelas berkuasa atau hanya sebatas revolusi politik. Sebagai misal, perang-perang kemerdekaan di negara-negara Asia-Afrika tiada lain adalah perang kepentingan antara borjuis nasional dan borjuis penjajah. Hikmah lainnya adalah bahwa kelas berkuasa akan menciptakan dan terus berupaya melanggengkan ideologi yang membenarkan tindakannya dalam revolusi di mata semua kelas yang (akan) dikuasainya. Nasionalisme, satu-nusa satu-bangsa, senasib-sepenanggungan, patriotisme, dan sebagainya adalah contoh hasil perjuangan borjuis nasional mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan produksi negerinya mengusir borjuis asing.

Dalam ideologi borjuis yaitu liberalisme dan demokrasi, kebebasan (termasuk pasar bebas tenaga kerja) merupakan tujuan akhir. Semua orang mempunyai hak untuk melakukan atau memiliki sesuatu yang diinginkan. Semua orang berhak untuk memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Tapi hanya borjuis yang bisa memperoleh pendidikan dan penghidupan yang (lebih dari) layak. Semua orang berhak menentukan jalannya negara. Namun hanya borjuis yang mampu mempengaruhi pengambil kebijakan dengan kekuasaannya atas mesin politik dan ekonomi. Boikot investasi, penekanan lewat tenggat waktu hutang, penutupan pabrik, atau penggerakan lumpen proletar (terutama preman-

⁵ *Ibid.*, hlm. 5

preman) untuk membuat huru-hara, sudah menjadi cara manjur bagi borjuis untuk mengembalikan kekuasaannya. Ketika kepentingan mereka terganggu, tidak jarang aparat bersenjata digunakan untuk memulihkannya. Kapitalis yang menarik investasinya dengan pemindahan pabrik-pabrik bukanlah pengganggu ketertiban dan keamanan, tapi proletar yang berujung rasa harus dihadapkan pada moncong senjata tentara. Kapitalis yang hutang macet bermilyar dolar bukanlah penjahat, tapi proletar yang menagih tunjangan kesehatan dan transportasi adalah orang yang tak tahu keadaan. Borjuis yang aktif dalam klub belanja atau klub makan malam adalah warga negara terhormat, tapi proletar yang aktif dalam serikat buruh harus disingkirkan.

“Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas.” Itulah kalimat pembuka Manifesto.⁶ Bagi Marx, kelas merupakan pengelompokan sosial yang paling mendasar dalam masyarakat yang di dalamnya terkandung kekuatan dahsyat bagi perubahan sosial. Melihat arti penting kelas dalam analisis Marx atas sejarah, cukup mengagetkan juga bahwa Marx tidak menawarkan analisis yang sistematis terhadap konsep ini. Pertanyaan yang hadir setelah membaca beberapa karya Marx adalah ‘ada berapakah kelas dalam tatanan masyarakat borjuis?’ Dalam Kapital jilid III, Marx menyebut model tiga kelas: pekerja-upahan, kapitalis, dan pemilik lahan. Dalam Manifesto Marx mengajukan model dua-kelas: borjuis-proletar. Menurut Marx masyarakat

⁶ Karl Marx & Engels, *Manifesto Partai Komunis* (1848), Surat Edaran Marx dan Engels (1848).

secara keseluruhan pada akhirnya hanya akan menyisakan dua kelas utama yang saling berhadapan dalam tatanan ekonomi kapitalis.⁷ Borjuis adalah sekelompok pemilik alat-alat produksi dan pembeli tenaga kerja; proletariat adalah sekelompok orang yang tidak memiliki sama sekali alat produksi dan hidup dari menjual tenaga kerjanya. Jadi, patokan untuk menentukan sebuah kelas adalah hubungannya dengan kepemilikan atau kekuasaan dalam produksi kapitalis. Tapi, selain borjuis dan proletar, Marx juga menyebut ‘brojuis kecil’ dan petani sebagai kategori kelas sosial-ekonomi.

Kedua kelas tengah-tengah ini, menurut Marx, akan mengalami tekanan dalam tatanan kapitalis dan harus memilih takdirnya, menjadi bagian dari barisan proletar atau bisa naik kelas menjadi borjuis. Contoh jelas di sekitar kita adalah pertumbuhan industri maklun dalam industri pakaian di Majalaya dan sekitarnya. Borjuis-borjuis kecil yang memiliki alat produksi (mesin jahit) dalam industri rumah tangganya, mau tidak mau harus terintegrasi ke dalam sistem industri yang lebih besar dan menjalankan produksi pesanan dalam jalur monopoli. Industri-industri kecil ini akhirnya hanya menjadi pekerja upahan dari pemilik kapital yang lebih besar. Tekanan persaingan antar borjuis tidak lagi memungkinkan mereka menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan produk pabrik kapitalis besar. Kemampuan kapitalis besar untuk mengeksploitasi lebih banyak tenaga

⁷ Karl Marx, *Das Kapital III; Sebuah Sejarah Ekonomi Politik*. Terj; Oey Hay Djoen, (Yogyakarta, Hastamitra, 2007), hlm. 910

kerja menjadikan harga produk mereka jauh lebih murah daripada yang dihasilkan industri rumahan.

Kapitalisasi pertanian dan monopoli bibit, pupuk, dan kredit di tangan borjuis telah menjadikan marhaen-marhaen di pedesaan Jawa hanya buruh upahan untuk industri pertanian besar. Petani-petani yang menguasai lahan luas dan mampu membayar tenaga kerja untuk sementara berada dalam jaringan kapitalis dan menjadi borjuis desa. Persaingan antarborjuis perdagangan eceran (mal, supermarket, grosir dll.) akan menekan harga beli di tingkat petani serendah mungkin. Selain itu petani sama sekali tidak mempunyai kedaulatan atas apa yang (ingin) mereka tanam.

Kelas yang cukup sulit ditempatkan dalam model dua-kelas adalah kaum terpelajar dan produsen jasa seperti guru, dosen, politikus partai, konsultan, sastrawan, atau seniman. Golongan ini jelas tidak secara langsung menjadi bagian dari hubungan produksi. Tapi, perkembangan mutakhir menegaskan teori Marx bahwa kelas terpelajar ini telah dikutuk menjadi pekerja-pekerja upahan yang hidup dari menjual kemampuannya. Ketika lembaga-lembaga pendidikan berubah menjadi pabrik produksi tenaga-tenaga kerja yang akan mengabdikan pada kapital, maka dosen atau guru tidak berbeda dengan proletar pada umumnya. Mereka menjadi bagian dari kekuatan produksi perusahaan pendidikan yang hidup dari upah. Tetapi, berbeda dengan proletar pada umumnya, kelas ini cenderung pada kepentingan kelas borjuis dan menjadikan gaya hidup kapitalis sebagai orientasi gaya hidup mereka. Anggota kelas ini, sebagian besar, bersama-sama dengan

borjuis kecil dan petani pemilik lahan bisa saja aktif dalam setiap revolusi politik yang hanya mengganti satu golongan borjuis dengan golongan borjuis lainnya, tapi akan menjadi reaksioner dalam revolusi sosial yang mengubah tatanan sosial ekonomi secara mendasar karena kepentingan mereka terkait langsung maupun tidak dengan kepentingan borjuis.

Dalam peristiwa penggulingan Soeharto 1998 revolusi politik terjadi sebagai puncak pertentangan kepentingan antara borjuis konglomerasi besar di pusat kekuasaan dengan borjuis-borjuis kecil yang berada di pinggiran kekuasaan baik di Jawa maupun (dan terutama) luar Jawa. Perjuangan borjuis nasional ini didukung oleh kaum terpelajar, termasuk mahasiswa lewat gagasan desentralisasi kekuasaan, otonomi daerah, dan pemerataan pembangunan wilayah. Beberapa waktu kemudian tidak heran banyak yang kecewa dengan gerakan reformasi. Jelas kiranya bahwa kelompok-kelompok yang menggulingkan rezim Soeharto tidak akan mau menghancurkan tatanan dasar ekonomi borjuis tempat mereka menjadi bagiannya. Yang ditentang bukan tatanan borjuasi itu sendiri, tapi monopoli kapitalis konglomerasi di pusat kekuasaan. Tujuannya tiada lain adalah merangsek ke dalam gudang-gudang kekuasaan politik dan ekonomi dan membongkarnya agar daya gaib kekuasaan itu menyebar ke semua borjuis lokal di daerah. Desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah memungkinkan daerah berhubungan langsung dengan kapital dari luar negeri. Investasi asing lebih mudah masuk. Semua ini ditopang oleh konsep, teori, dan analisis kaum terpelajar

tentang demokratisasi, otonomi daerah, pembangunan wilayah tertinggal, dan investasi langsung.

Baik dalam Manifesto maupun Brumaire XVII, Marx mencantumkan *lumpen-proletar* sebagai kelas.⁸ *Lumpen-proletar* mencakup jembel, luntang-lantung, preman, bajingan, penjahat, dan semua orang yang terdepak dari hubungan-hubungan produksi yang ada dalam masyarakat. Pengangguran miskin, pekerja serabutan yang jarang bekerja, juga bisa dimasukkan dalam kelas ini. Salah satu faktor dalam kemenangan Louis Bonaparte tiada lain adalah organisasi para lumpen-proletar Perkumpulan 10 Desember. Dengan mengorganisasi para luntang-lantung, preman, pengangguran, dan jembel, Louis Bonaparte membubarkan parlemen dan mengukuhkan dirinya sebagai Kaisar. Dalam kasus ini lumpen-proletar merupakan kelas yang dimanfaatkan borjuis keuangan Perancis dalam menyingkirkan sisa-sisa dinasti feodal dan golongan borjuis lainnya sekaligus menghalangi proletar Paris untuk memegang tampuk kepemimpinan revolusi. Menurut Marx, lumpen-proletar itu reaksioner dalam arti ketika dibeli oleh borjuis, maka kepentingannya akan sejalan dengan borjuis dalam revolusi-revolusi politik. Lumpen-proletar adalah senjata ampuh borjuis untuk memukul perjuangan proletar. Konflik kepentingan borjuis-proletar bisa disulap sebagai konflik horizontal antaretnis atau antaragama. Dalam naungan borjuis, lumpen-proletar bisa menjadi alat akumulasi kapital yang brutal lewat

⁸ Karl Marx, *Brumaire XVIII Louis Bonaparte*, terj. Oey Hay Djoen (Yogyakarta, Hastamitra, 2007), hlm. 63

pemerasan, pengorganisasian pengemis, penguasaan ekonomi gelap dan jasa-jasa ilegal (penyelundupan, pelacuran, perjudian, penagih utang, pembunuh bayaran, lahan-lahan parkir, keamanan, dan lain-lain).

Dinasti-dinasti lumpen-proletar terorganisasi di Indonesia yang umumnya di bawah naungan kelas birokrasi militer pada mulanya diorganisasi untuk membantu memukul mundur kekuatan politik kaum komunis pasca-G30S. Dalam perjalanannya, mereka menjadi mesin pengambilan surplus secara brutal dan pengaman informal partai borjuis nasional. Perusahaan-perusahaan yang membiayai dan dilindungi partai-partai borjuis nasional ini yang akan tetap menjaga lumpen-proletar terorganisasi berada dalam kedudukannya sebagai tangan-tangan dinasti borjuis nasional. Terusirnya para petani dan buruh-buruh tani miskin dari ekonomi pertanian pedesaan menyediakan suplai abadi kelas lumpen-proletar. Borjuis-borjuis nasional memanipulasi ideologi keagamaan serta etnisitas pada baju-baju lumpen-proletar terorganisasi untuk mengaburkan perjuangan kepentingan ekonomi-politik mereka dalam melanggengkan penindasan terhadap proletar.

Secara sosiologis, model dua kelas Marx tidak memadai menggambarkan kenyataan sosial, namun model ini menampung juga kenyataan bahwa meski di luar skema borjuis-proletar, kelas-kelas yang ada merupakan 'calon-calon kuat' untuk mengisi barisan perjuangan kelas borjuis atau proletar dalam kutukan abadi kapitalisme.

B. Kritik Terhadap Ideologi Borjuis

Penjelasan di atas merupakan gambaran secara histories munculnya kelas dan ideologi borjuis yang secara tepat diuraikan oleh Marx. Sebagai antitesa penjelasan di atas dengan tegas dapat dikatakan bahwa mengajukan sesuatu sebagai kepentingan umum yang sebenarnya merupakan kepentingan egois pihak yang berpamrih (kelas borjuis) itulah inti dari apa yang oleh Marx disebut sebagai ideologi.⁹ Ideology adalah ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa sehingga orang menganggapnya sah, padahal jelas tidak sah. Ideology melayani kepentingan kelas borjuis (ideology borjuis) karena memberikan legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi. Kritik ideology borjuis adalah salah satu sumbangan terpenting teori Marx terhadap analisis struktur kekuasaan dalam masyarakat.

Marx memberikan contoh pendekatan ideologis. Yang telah disebutkan di atas adalah klaim Negara bahwa ia mewujudkan kepentingan umum padahal ia melayani kepentingan kelas berkuasa (borjuis). Begitu pula tuntutan untuk taat kepada hukum dianggap ideologis, karena tuntutan itu dibenarkan dengan keadilan hukum, padahal hukum melayani kepentingan golongan atas (borjuis), sedangkan orang kecil (kelas proletar) sulit untuk memanfaatkan keadilan yang disemai maupun diwacanakan oleh hukum.¹⁰

⁹ Budi Hardiman, *Filsafat Modern; dari Machiavelli sampai Nietzsche* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 239

¹⁰ David Mc Lelland, *Ideology Tanpa Akhir*, terj. Muhammad Syukri (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005), hlm. 25

Kapitalisme membenarkan diri dengan dua pertimbangan yang khas ideologis karena sekaligus menutup-nutupi bahwa system kapitalis menguntungkan para pemilik modal. Pertama, kapitalisme mengklaim bahwa is adalah system social-ekonomis pertama yang tidak mengenal privilege, yang memperlakukan setiap orang secara sama, yang menghormati kebebasan siapa pun yang mau berusaha untuk maju dan untuk memberi imbalan atas prestasi.¹¹ Tetapi kapitalis mengabaikan kenyataan bahwa, karena anggota masyarakat tidak sama kekuatannya (baik akses terhadap ekonomi, politik bahkan hukum), kesamaan formal tidak dapat dipergunakan oleh mereka yang lemah. Apabila yang kuat dan yang lemah sama bebasnya maka yang kuat akan selalu mendahului yang lemah. Begitu pula kelas proletar (buruh), ia memang bebas untuk menerima atau tidak menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh pemodal (kelas borjuis), akan tetapi karena ia hanya dapat hidup apabila ia bekerja, ia terpaksa “dengan bebas” menerima pekerjaan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sepihak oleh majikan (pemodal; kelas borjuis).¹² Argument kedua dijelaskan secara panjang lebar oleh Marx dalam karya utamanya *Das Capital*: secara formal, kapitalisme menjaga keadilan karena ia membayar upah yang cukup agar tenaga kerja yang dihabiskan dalam pekerjaan bagi sang kapitalis dapat dikembalikan. Menurut Marx, prinsip kapitalis adalah pertukaran nilai yang

¹¹ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, hlm. 122

¹² David Mc Lelland, *Ideology Tanpa Akhir*, hlm. 27

sama (*exchange of equivalent*).¹³ Akan tetapi keadilan yang dijaga itu ternyata sangat ideologis atau miring, karena menutupi nilai lebih buruh yang dihabiskan (eksploitasi) oleh majikan.¹⁴

Akan tetapi kritik ideology Marx terhadap ideology borjuis lebih luas jangkauannya. Menurut Marx, semua system besar yang memberikan orientasi kepada manusia bersifat ideologis.¹⁵ Yang paling terkenal adalah kritik Marx terhadap agama. Menurut Marx, agama adalah candu rakyat.¹⁶ Candu itu memberikan kepuasan, tetapi kepuasan itu semu karena tidak mengubah situasi buruk si pecandu. Seperti candu, agama memberikan kepuasan semu tanpa mengubah situasi buruk orang kecil. Agama menjanjikan ganjaran (hidup bahagia) di akherat bagi orang yang tabah menerima “nasib” atau “salibnya”. Maka rakyat kecil bukannya memperjuangkan perbaikan nasib mereka, tetapi malah bersedia menerima penghisapan dan penindasan yang dideritanya, hal yang justru menguntungkan kepentingan kelas-kelas yang menindas.

Begitu pula pandangan-pandangan moral masyarakat, nilai-nilai budaya, filsafat dan seni menunjang kepentingan kelas-kelas atas. Nilai kerukunan misalnya, menguntungkan majikan karena atas nama nilai itu buruh (kelas proletar) dapat dilarang mogok kerja: ia bersedia menerima kompromi, bukan

¹³ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, hlm. 123

¹⁴ Jon Elster, *Karl Marx; Marxisme-Analisis Kritis*, terj. Sudarmaji (Jakarta, Prestasi Pustakakarya, 2000), hlm. 90-91

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, hlm. 123

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 73-74

memperjuangkan keadilan. Begitu juga tuntutan moral agar kita bersikap *sepi ing pamrih*, tidak mau menang sendiri, secara efektif dapat mematikan ambisi orang kecil (kelas proletar) untuk membebaskan diri dari ketertindasannya.

Perlu diperhatikan bahwa ideology dalam arti yang sebenarnya bukan sarana yang dipakai oleh kelas-kelas atas (borjuis) untuk menipu kelas proletar. Ideology benar-benar dipercaya oleh masyarakat dengan polos. Karena itu ideology tersebut sangat kuat menancap dalam batang tubuh masyarakat. Si kapitalis secara subjektif jujur apabila ia yakin bahwa siapa saja yang dengan rela dan setia memenuhi kewajiban-kewajibannya masing-masing—bukan berambisi untuk meraih kedudukannya yang lebih tinggi—adalah memenuhi kehendak Tuhan. Tetapi mengapa agama, moralitas dan nilai-nilai budaya dan sebagainya selalu dan dengan sendirinya menguntungkan kelas-kelas atas. Karena sebagaimana ditulis Marx, bahwa “pikiran-pikiran kelas berkuasa (borjuis) disetiap zaman merupakan pikiran-pikiran yang berkuasa, artinya, kelas yang merupakan kekuatan material masyarakat yang berkuasa sekaligus merupakan kekuatan spiritual masyarakat”.¹⁷ Mengapa demikian, karena hanya kelas-kelas yang “menguasai sarana-sarana produksi material sekaligus menguasai sarana-sarana spiritual”¹⁸ artinya, hanya kelas-kelas atas (borjuis) yang mampu meresmikan dan menyebarkan pikiran-pikiran mereka. Kalaupun orang-orang kelas proletar mempunyai pengertian sendiri (seperti masyarakat jawa yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 124

¹⁸ Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx; Materialisme Dialektis dan Materialisme Histories*, (Yogyakarta, LKiS, 2004), hlm. 111

diwakili dalam wayang oleh para punakawan), pengertian itu tidak dapat disebarluaskan sehingga orang-orang desa sendiri yakni bahwa nilai-nilai orang-orang kraton lebih tinggi (dan para punakawan hanya abdi orang-orang kraton kasatria). Pada umumnya nilai-nilai resmi masyarakat—yang juga dibatinkan—adalah nilai-nilai kelas atas.¹⁹

Dengan demikian penulis menyimpulkan yang dapat diambil dari kritik ideology Karl Marx terhadap ideologi borjuis adalah bahwa kita sebaiknya curiga kalau penguasa memberikan “khotbah” masyarakat tentang nilai-nilai luhur serta kewajiban-kewajiban moral mereka. Sering tanpa disadari, “khotbah-khotbah” macam itu sarat dengan pamrih atau ideologis kelas yang mereka wakili yaitu kelas borjuis.

C. Islam dan Ideologi Borjuis

Dalam sub-bab terakhir ini, penulis sengaja mengkorelasikan secara langsung konsep ideology borjuis dalam konteks Islam. Tentunya konsep Islam borjuis ini juga penulis bandingkan dengan konsep Islam proletar.

Fenomena keagamaan generasi 90-an memberikan pandangan secara umum dan dapat diperlihatkan adanya dua model: pertama, mereka yang mengembangkan gagasan-gagasan kiri dengan mengadopsi Marx, Nietzsche, tokoh-tokoh kiri Islam seperti Hassan Hanafi, Al-Jabiri, dan seterusnya; kedua

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, hlm. 125

mereka yang juga mengembangkan serius gagasan-gagasan yang lebih dekat dengan Yusuf al-Qhardawi, Ikhwanul Muslimin, dan yang sealiran. Kecenderungan-kecenderungan ini membawa konsekuensi-konsekuensi terhadap gagasan-gagasan yang diusung. Kelompok-kelompok “Kiri Islam” lebih mengusung gagasan-gagasan pembebasan, advokasi dan kritisisme yang diderivasi dari Islam bukan dalam aras simbolik; dan kelompok-kelompok yang kedua menghasilkan gagasan-gagasan yang masih mengindikasikan simbolisme Islam.²⁰

Dalam batas-batas tertentu, mereka menggumuli hal-hal yang disimbolkan dengan Islam. Dan, yang perlu diingat, ini adalah kecenderungan-kecenderungan umum dengan mengabaikan sisi-sisi terkecil yang barangkali bisa berbeda di dalam masing-masing komunitas kelompok muda itu. Dengan sendirinya, mereka yang dihubungkan dengan model kelompok-kelompok “Kiri Islam” berasal dari komunitas yang oleh para peneliti kehidupan santri di Indonesia diidentifikasi dengan “Islam Tradisional”, dan yang kedua berasal dari komunitas “Islam Modern”.²¹ Kalau selama ini umat Islam, misalnya yang paling mapan dikonstruksi memakai konsep Islam Modern dan Islam Tradisional, mengambil istilah Nur Chalik Ridwan konsep Islam Borjuis untuk konteks kaum yang sering

²⁰ Airlangga Pribadi, *Post Islam liberal; Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksperimentasi* (Jakarta, Gugus Press, 2002), hlm. 177-178

²¹ Nur Khalik Ridwan, *Membedah Gagasan; dari Narasi Permukaan ke Narasi Tak Terbaca*, dalam *Jurnal Gerbang*, Vol V (Surabaya, èLSAD, 2003), hlm. 174

disebut Modernis, dan Islam Proletar untuk konteks kaum yang sering disebut Tradisionalis.

Konsep Islam Borjuis dan Islam Proletar di sini, mengandaikan pembacaan bukan didasarkan pada ide-ide, gagasan-gagasan dan agregasi dari komunitas Islam yang lepas dari konteksnya. Konteks yang ingin dibaca dalam hal ini adalah basis sosial masyarakat Muslim. Jelas, pembacaan yang didasarkan pada konteks basis sosial masyarakat Muslim, selama ini belum dilakukan. Sebab, konstruksi umat Islam selama ini didasarkan pada asumsi dasar yang berkaitan dengan nalar, pikiran, ide-ide dan gagasan semata. Katakanlah dalam konstruksi Islam Tradisional-Islam Modern, Islam Liberal-Islam Literal, Islam Inklusif-Islam Eksklusif, dan konstruksi lain, yang jelas-jelas memberikan pijakan dasarnya pada konteks ide-ide, bukan basis sosial masyarakatnya.²²

Problem pembacaan yang didasarkan pada asumsi nalar, terletak pada soal, seakan-akan sebuah ide dan gagasan datang dengan sendirinya, tidak memiliki kepentingan apa pun. Ide-ide dalam pembacaan yang didasarkan pada nalar semata, dengan melepaskan kepentingan tersebut akan mengaburkan sebuah gagasan sebagai wacana yang dimainkan, digumulkan dan diperebutkan dalam realitas masyarakat. Padahal ide-ide apa pun di dalam realitas masyarakat, sangat berkaitan dengan pertarungan wacana ini. Seakan-akan kalau sudah disebut Islam Liberal-Islam Literal, Islam Modern-Islam Tradisional dan Islam apa pun yang

²² *Ibid.*, hlm. 172

didasarkan pada asumsi ide semata, sudah dianggap sebagai benar adanya, yang steril dari kepentingan.

Ketidakpercayaan dalam mengkonstruksi umat Islam Indonesia yang semata-mata didasarkan pada ide-ide semata itu, telah menghantarkan pada konsep baru Islam Borjuis dan Islam Proletar. Konstruksi umat Islam yang memakai konsep Islam Borjuis dan Islam Proletar terang-terangan tidak hanya puas dengan ide-ide yang dilepaskan dari kepentingan basis sosial masyarakat atau komunitas. Islam Borjuis dan Islam Proletar, dengan sendirinya hadir sebagai sebuah konstruksi yang didasarkan dengan asumsi dasar basis sosial masyarakat yang membentuk komunitas Islam santri di Indonesia. Basis komunitas masyarakat santri yang Islam Borjuis diasumsikan sebagai komunitas Muslim yang memiliki basis sosial ekonomi yang cukup mapan, yang dalam gugusan kelas sosial muslim terhitung kelas menengah ke atas. Sementara masyarakat santri yang Islam Proletar diasumsikan sebagai komunitas Muslim yang berbasis sosial ekonomi miskin, yang dalam gugusan sosial Muslim terhitung kelas sosial menengah ke bawah.²³

Lalu, apakah ada komunitas yang kita asumsikan demikian itu, dalam konteks Islam Borjuis dan Islam Proletar itu dalam masyarakat Islam Indonesia ? Sebenarnya, konsep Muslim Borjuis telah disinggung-singgung oleh Denys Lombard dan W.F. Wherteim, tetapi keduanya tidak membuat konstruksi tentang Islam Proletar. Penambahan konstruksi Islam Proletar dari apa yang dimaui

²³ *Ibid.*, hlm 180

Lombard dan Wherteim itu, sehingga memunculkan Islam Borjuis-Islam Proletar, berdasarkan pelacakan pada munculnya kolonialisme Belanda, yang memisahkan desa-kota semakin betul-betul ada, yang menjadikan kota sebagai betul-betul tempat mobilitas sosial, industri, dagang dan seterusnya; dan desa yang tetap agraris tempat bertani, telah memunculkan dua pola elit-elit muslim santri.²⁴ Model pertama, elit Muslim yang lahir dari basis sosial masyarakat agraris di daerah pedesaan Jawa dan bahkan di luar Jawa; dan elit muslim yang lahir dari komunitas Muslim kota yang cukup mapan.

Elit yang didasarkan pada konteks basis sosial agraris memiliki konstituen riil kelompok-kelompok petani, yang bisa jadi elit-elit ini pun terhitung cukup mapan sebagai tuan tanah, atau kelompok kaya dari hasil agrarisme. Konstituen riil kelompok-kelompok ini dicoba untuk diwadahi dalam satu gugusan Islam yang diorganisir oleh pesantren dan Kiai yang lebih banyak tidak bersentuhan dengan kehidupan borjuis di kota-kota. Eli-elit yang lahir dari komunitas agraris mewarisi semangat Islam model wali sanga dan Syaikh Siti Jenar.

Elit Muslim yang didasarkan pada konteks basis sosial kota-kota, pedagang dan cukup mapan, meskipun tentunya di bawah para Borjuis-Kolonial, Borjuis-Pariah China dan Borjuis-Birokrat para pangreh praja, telah membentuk satu gugusan Muslim Borjuis. Sebab, pada akhirnya elit-elit yang muncul di daerah perkotaan memilih meneruskan perspeksi wahabi yang berbeda dengan

²⁴<http://nurkhalik.wordpress.com/2008/07/31/buku-%E2%80%9Cislam-borjuis-vs-islam-proletar%E2%80%9D>

persepsi wali sanga- Syaikh Siti Jenar. Munculnya elit-elit yang membawa persepsi wahabipun menyebar di dalam sentra kota-kota, dan diikuti oleh kebanyakan kelompok Muslim mapan dan kaum pedagang.

Pemilahan adanya kelompok muslim yang didasarkan pada basis sosial agraris dan basis sosial dagang di kota, semakin terbenarkan ketika elit-elit Muslim di kota mengkristal dalam organisasi-organisasi kaum Muslim puritan: Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, Sumatra Thawalib, dan seterusnya. Dalam politik mengkristal dalam Masyumi.²⁵ Sementara untuk elit-elit Muslim yang berbasiskan agrarisme mengkristal dalam NU, Perti dan seterusnya. Pemilihan yang demikian ini, diikuti dengan konstituen mereka yang jauh berbeda, yang kemudian diasumsikan sebagai Islam Borjuis dan Islam Proletar yang dipakai di sini.

Islam Borjuis, jelas konstituennya adalah kaum menengah ke atas di lapisan santri. Pertama-tama adalah kaum pedagang di kota-kota sebagai generasi pertama di masa kolonial. Setelah itu di masa kemerdekaan, muncul kaum terdidik formal hingga bergelar doktor-profesor, para guru dan para pegawai sebagai konstituennya, dan bahkan eksekutif-eksekutif muda pula menjadi konstituennya. Para kaum Borjuis Muslim inilah, yang akhirnya mampu menjadi dosen di hampir semua perguruan tinggi Muhammadiyah, IAIN dan dosen di

²⁵ *Menembus Batas Tradisi; Refleksi atas Pemikiran Nurchalis Madjid*, pengantar. Ahmad Syafi'i Maarif (Jakarta, Paramadina, 2006), hlm. 3

universitas negeri lain, selain dominasi kaum Sosialis. Di akhir-akhir ini, ada petani yang menjadi konstituennya, tetapi sangat kecil dan tidak signifikan.

Sementara, Islam Proletar konstituennya riil sejak awal adalah masa santri pesantren, para petani di daerah-daerah Jawa di luar konstituen Islam-Komunis dan Islam-Marhaenis. Umumnya mereka belum terdidik formal hingga tahun 70-an, barulah mereka merambah IAIN. Di tingkat yang riil, merekalah yang menjadi para TKI keluar negeri yang memang dari “wong ndeso”. Hampir tidak mungkin para TKI adalah berasal dari jalur Islam Borjuis, dan walaupun ada itu juga tidak signifikan, sangat kecil. Memang ada kemudian yang mencoba bergulat dan menjadi pedagang, pengusaha dan menempuh pendidikan, tetapi ini belum lama, dan tidak signifikan pula, sebab konstituen riil mereka adalah kaum miskin di desa-desa yang terhimpun sebagai komunitas Muslim Proletar.²⁶

Dengan begitu, asumsi yang didasarkan basis sosial di sini dipakai untuk mengkonstruksi komunitas, bukan merujuk ke individu, sama seperti orang mengkonstruksi Islam Modern-Tradisional. Bedanya dengan Islam Modern-Islam Tradisional, Islam-Borjuis Islam Proletar memakai asumsi dasar basis sosial dan konstituennya yang dipakai untuk menjadi dasar pijakan. Kalau pada akhirnya, kategori model ini dianggap problem, bukankah semua katagori tentang umat Islam juga problem, dan tidak pas sepas-pasnya. Katakanlah konsep Islam Modern-Islam Tradisional atau Islam Liberal-Islam Literal, semua mengandung

²⁶ Nur Khalik Ridwan, *Membedah Gagasan; dari Narasi Permukaan ke Narasi Tak Terbaca*, hlm. 182

problem di dalam dirinya sendiri, sama seperti juga setiap konsep, teori dan gagasan mengandung problem yang laten.

Dalam dua komunitas “Islam Borjuis” dan “Islam Proletar”, pemaknaan Tuhan tetap sama, yakni Tuhan dimaknai secara abstrak, dalam artian keabstrakan Tuhan dikatakan seolah-olah tindakan seseorang dan pemahamannya tentang agama manifestasi dari Tuhan. Akhirnya, orang sering terjebak pada konsep-konsep syirik konvensional: nyembah berhala, batu, kuburan dan seterusnya diserapah. Pemaknaan Tuhan seperti ini menurut saya tidak mengena untuk rekonstruksi Agama yang membebaskan.²⁷ Akhirnya pula, dalam buku ini Tuhan dibedakan menjadi dua hal, “yang di sana” adalah Tuhan yang tidak terdefiniskan dan tak terjangkau. Sementara ketika orang memaknai Tuhan adalah pemahaman orang, dan dalam konteks itulah Tuhan “yang di sini” berbeda dengan “yang di sana”. Tuhan yang di sini haruslah riil, dan realitasnya ada dalam pembelaan terhadap kelompok-kelompok lemah. Sebab, bagaimana mungkin anda berbicara tentang Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih dan Kaya untuk konteks di dunia, kalau anda sedang kelaparan, kalau anda menyaksikan orang-orang Afrika kelaparan, pengungsi merana dan seterusnya: dimana Tuhan kok tidak turun ? Ketika Tuhan harus real, buku ini melakukan pemihakan bahwa Tuhan ada dalam kelompok tertindas dan kaum miskin, dan Tuhan yang real adalah tangan-tangan anda sendiri untuk membebaskan mereka.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 183

Pembongkaran lain juga ada dalam masalah pluralisme agama. Dalam dua komunitas itu (Islam Borjuis-Islam Proletar) masih tetap meyakini, misalnya adanya agama samawi dan agama bumi, serta rukun Islam yang lima dan Islam-Muhammad sebagai satu-satunya kebenaran. Dimulai dengan teas bahwa keselamatan agama ada dalam setiap orang, dengan syarat mereka melakukan kebajikan dan tidak menindas orang lain. Bagi saya, dengan sendirinya semua agama adalah dari Tuhan. Kalau setiap agama mengajarkan kebaikan, bagaimana sebuah kebaikan bukan berasal dari Tuhan. Dengan sendirinya pula, bukankah semua agama adalah dari Tuhan ? Demikian juga, bahwa “rukun Islam”, adalah satu, yaitu berbuat kebajikan. Sementara yang lain, seperti yang sering diklaim “rukun Islam yang lima” adalah masalah keimanan, yang antara satu komunitas agama berbeda dengan agama lain. Lalu, masalah mempercayai Tuhan, dijelaskan bahwa sudah sejak lahir manusia mengikat perjanjian pada Tuhan dan bersaksi bahwa Tuhannya hanyalah satu. Tuhan Satu itu, bisa saja namanya Allah, Sang Hyang Widi, yahweh, Gusti dan seterusnya. Karena manusia sudah mengikat perjanjian untuk mengakui Tuhan, dengan sendirinya, bukan masalahnya lagi orang bertuhan atau tidak, tetapi apakah orang berbuat kebaikan apakah tidak. Terminologi inilah yang kemudian melahirkan musyrik non-musyrik, bukan ateis-non-ateis.

Karena itu sanggahan adanya klaim “Islam Murni”, sejati, tunggal, dan serba sempurna. Sebab, apa yang disebut Islam, dalam konteks Nabi Muhammad

dan pengikutnya adalah pemahaman, dan karenanya tidak ada yang murni.²⁸ Dengan sendirinya, yang ada adalah Islam yang tidak murni, yakni pluralitas dan lokalitas. Paradigma Islam yang plural inilah yang menyanggah adanya “Islam Murni” dan tunggal sebagai bentuk Islam yang riil. Dengan sendirinya pula, Islam yang demikian bermacam-macam, yang konsekuensinya bahwa bid’ah-bid’ah menjadi keharusan, dalam pengertian pemaknaan-pemaknaan yang tidak tunggal itu adalah justru konsekuensi dari keislaman.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 188-189